

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PELESTARIAN
LINGKUNGAN DI SALURAN IRIGASI DI KELURAHAN
PALLEKO KECAMATAN POLONGBANGKENG
UTARA KABUPATEN TAKALAR**

OLEH :

RUSLAN JABAL NUR

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

A. ACO AGUS

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

NURKHARSYA KHAER HANAFIE

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Pengetahuan hukum masyarakat di Kelurahan Palleko terhadap pelestarian lingkungan di saluran irigasi, (2) Sikap Perilaku hukum masyarakat di Kelurahan Palleko terhadap pelestarian lingkungan di saluran irigasi, (3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Palleko dalam mengatasi masalah pencemaran irigasi. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 30 orang yang tinggal di Kelurahan palleko dengan penarikan sampel secara Random Probability Sampling, yaitu pengambilan sampel dari populasi secara acak dengan memperhatikan jumlah sampel dengan tujuan sampel digeneralisasikan pada populasi. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pedoman wawancara, Kuesioner berupa angket, prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai permasalahan. Hasil penelitian (1) Berdasarkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui dan sama sekali tidak pernah mendengar mengenai undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup, (2) Berdasarkan dari hasil pemberian angket dengan menggunakan skala likert menunjukkan bahwa sikap perilaku hukum masyarakat terhadap pelestarian lingkungan cukup layak dengan persentase 63,92%, (3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Palleko dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan masih belum maksimal terbukti dengan minimnya pengadaan fasilitas umum seperti tempat sampah dan sosialisasi pemerintah yang belum merata kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan.

Kata Kunci : Kesadaran hukum, Pelestarian Lingkungan, Irigasi

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 1 Ayat (3) tercantum bahwa Indonesia adalah negara hukum, penegasan konstitusi ini mengandung arti bahwa setiap tingkah laku masyarakat diatur dalam hukum. Manusia sebagai subjek hukum hendaknya taat dan patuh terhadap peraturan.

salah satu kewajiban warga negara yang baik adalah menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 70 yang mengatur tentang peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan dijelaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan.

Manusia dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan komponen sistem yang tidak dapat dipisahkan karena manusia memiliki keistimewaan tersendiri sebagai komponen ditempatkan berbeda dengan makhluk lainnya. Dimana manusia adalah bagian dari lingkungan hidup dan sebagai pengelola dari lingkungan itu sendiri.

Lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap manusia sehingga

dapat dikatakan bahwa eksistensi dan kehidupan manusia ada pada lingkungan hidupnya dan membutuhkan interaksi dengan lingkungan agar dapat menjaga keseimbangan ekosistem.

Permasalahan lingkungan yang disebabkan masyarakat seperti, membuang sampah serta limbah pabrik dan limbah rumah tangga di saluran irigasi adalah contoh konkrit perilaku masyarakat yang tidak peduli pada lingkungan.

Berdasarkan hasil pengamatan, kondisi saluran irigasi yang ada di kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar yang terbentang dari utara ke selatan dengan panjang ± 2000 meter dengan lebar 2 meter, tampak berserakan sampah seperti plastik, kaleng, botol, ranting pohon, bangkai hewan, makanan sisa, sampah rumah tangga (domestik).

Di Kelurahan Palleko terdapat pabrik pembuatan tahu dimana limbah yang dihasilkan tidak diolah terlebih dahulu melainkan langsung dibuang ke saluran irigasi sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Saluran irigasi yang seharusnya dijaga kebersihannya menjadi tempat pembuangan sampah

dan limbah masyarakat, kondisi seperti ini sangat memperhatikan dan perlu adanya perhatian khusus pemerintah setempat serta peran masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Tinjauan Pustaka

Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang timbul dari hati seseorang untuk patuh dan taat pada peraturan yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto ada empat faktor kesadaran hukum yaitu:

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang oleh hukum atau diperbolehkan oleh hukum.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan tertentu, berkaitan dengan isi dari aturan tersebut.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah kecenderungan seseorang untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Artinya salah

satu tugas dari hukum adalah mengatur kepentingan masyarakat, biasanya berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan mengenai apa yang baik dan harus dihindari. Dengan demikian ketaatan masyarakat terhadap hukum tergantung bagaimana kepentingan dari masyarakat dalam bidang tertentu diatur oleh ketentuan hukum tersebut.

d. Perilaku hukum

Perilaku hukum adalah keadaan seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Perilaku hukum dapat menunjukkan adanya kesadaran hukum yang tinggi terbukti dengan yang bersangkutan dapat taat dan patuh terhadap hukum.

2. Pelestarian Lingkungan

Pelestarian lingkungan adalah bentuk upaya yang dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif yang terjadi akibat adanya kegiatan/ usaha dari masyarakat serta untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan lingkungan agar tetap dalam kondisi yang baik.

3. Irigasi

Irigasi merupakan saluran yang dibuat untuk mengairi lahan pertanian

atau suatu usaha untuk penyediaan, pengaturan, untuk menunjang pertanian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi Pasal (2) mengemukakan bahwa “irigasi diselenggarakan dengan tujuan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Hasil Penelitian

1. Pengetahuan hukum masyarakat terhadap pelestarian lingkungan di saluran irigasi di Kelurahan Palleko

Dari hasil penelitian mengenai pengetahuan hukum masyarakat terhadap pelestarian lingkungan di Kelurahan Palleko terhadap 30 responden 28 diantaranya tidak mengetahui dan sama sekali tidak pernah mendengar mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 2 diataranya mengetahui karena pernah mendengar tetapi tidak mengetahui.

2. Sikap perilaku hukum masyarakat terhadap pelestarian lingkungan di saluran irigasi di Kelurahan Palleko

Berdasarkan hasil penelitian dengan pemberian angket yang berisi

pernyataan sikap perilaku dengan menggunakan skala likert menunjukkan persentase cukup layak 63,92 %. Berdasarkan kriteria pada tabel kelayakan menurut Arikunto (2009 : 44)

3. Upaya yang di lakukan pemerintah kelurahan Palleko dalam mengatasi masalah pencemaran irigasi di Kelurahan Palleko

Dari hasil wawancara dengan Lurah Kelurahan Palleko dapat di simpulkan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat dalam mengatasi pencemaran lingkungan di saluran irigasi di Kelurahan Palleko.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengetahuan hukum masyarakat Kelurahan Palleko mengenai pelestarian lingkungan menunjukkan jika sebagian besar masih rendah terbukti dengan hasil wawancara dimana mereka tidak tahu dan tidak pernah mendengar tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana masyarakat memiliki peran penting dalam mengelola serta memanfaatkan lingkungan hidup tanpa harus merusaknya, tetapi realitanya adalah masyarakat

mengetahui jika membuang sampah dan limbah di saluran irigasi dapat mencemari lingkungan tetapi terus dilakukan selama bertahun-tahun.

2. Berdasarkan dari hasil pemberian angket dengan menggunakan skala likert menunjukkan bahwa sikap perilaku hukum masyarakat terhadap pelestarian lingkungan cukup layak, sebenarnya masyarakat menginginkan lingkungan yang bersih tetapi karena faktor kebiasaan serta minimnya prasarana yang mendukung seperti tempat penampungan pembuangan sampah sehingga sampah dan limbah dibuang di saluran irigasi.
3. Upaya Yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Palleko dalam mengatasi masalah pencemaran irigasi sejauh ini masih belum berjalan dengan maksimal terbukti dengan sosialisasi yang belum menyeluruh mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dalam hal ini Pelestarian saluran irigasi yang sarat dengan sampah dan limbah rumah tangga di Kelurahan Palleko sehingga ada beberapa masyarakat yang belum pernah mendengar sosialisasi dari pemerintah, minimnya tempat penampungan sampah, dan mengenai pengadaan tempat penampungan

sampah dan pengelolaan limbah masih dalam tahap perencanaan.

B. Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Saran

Pentingnya peran masyarakat dan pemerintah kelurahan Palleko agar bekerjasama dalam mengatasi pencemaran saluran irigasi karena pelestarian lingkungan merupakan tanggungjawab yang harus di selesaikan bersama-sama.

Referensi

- Afifuddin, Ahmad Saebani Beni. 2012.”*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Cetakan Ke 2. Bandung: Pustaka setia.
- Ahmad Saebani Beni. 2006.”*Sosiologi Hukum*”. Cetakan Ke 2. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Akib Muhammad. 2016. “*Hukum Lingkungan Perspektif global dan Nasional*”. Jakarta : Rajawali Pers.
- Azwar Saifuddin. 2016. “*Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*”. Cetakan Ke 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Darmono. 2010. "*Lingkungan hidup dan Pencemaran Hubungannya Dengan Toksikologi dan Senyawa Logam*". Jakarta: UI PRESS.
- Mertkusumo Sudikno. 1982."Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat". Yogyakarta. Liberty.
- Napitupulu Albert, 2013. "*Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*". Bogor: IPB PRESS.
- Neolaka Amos. 2008."Kesadaran Lingkungan". Jakarta : Rineka Cipta.
- Shohib Muhammad. 2007."Al-Qur'anulkarim Terjemahan Tafsir Perkata". Bogor : Syaamil Al-Qur'an.
- Soekanto Soerjono. 1982."Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum". Jakarta. CV Rajawali.
- Sugiharto. 2014." *Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah*". Jakarta: UI PRESS.
- Suyono. 2012." *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*". Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Subagyo. P joko. 2005." *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*". Cetakan Ke 4. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Tim Penyusun Laksana. 2019. Himpunan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Hidup. Cetakan 1. Yogyakarta: Laksana.
- Wahid Yunus. 2014."Pengantar Hukum Lingkungan". Makassar : Arus Timur.
- Undang-Undang:**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 77 Tahun 2009 Tentang Irigasi Pasal 2.